

## ABSTRAK

Nama : Ruth Sarah Magdalena

NIM : 01659210071

**Judul : Penerapan Itikad Baik Dari Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Perkara PT Prakarsa Semesta Alam**

(xi + 107 halaman)

Dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dipilihlah pengurus yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka dibuatlah penelitian ini untuk menyelesaikan, mengetahui dan memahami permasalahan yakni bagaimana pengaturan terkait peran dan fungsi pengurus dalam PKPU di Indonesia dan bagaimana penerapan itikad baik dari pengurus PKPU dalam kasus PT Prakarsa Semesta Alam (PT PSA). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaturan terkait itikad baik pengurus PKPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdapat dalam UUK dan peraturan pelaksanaannya, serta diatur dalam Standar Profesi Pengurus di Indonesia. Pengurus bertugas dan berwenang sebagai pengurus PKPU Debitor dalam hal administrasi dan sebagai Pengurus PKPU dalam hal pengurusan harta Debitor. Penerapan itikad baik oleh para pihak dapat terlihat pada beberapa kasus yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain bahwa dari ketiga putusan yang diteliti, hanya satu putusan yakni Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang menunjukkan adanya itikad baik dari Debitor. Ada pun faktor-faktor lainnya, seperti bidang usaha maupun nilai tagihan dapat berkorelasi dengan niat itikad baik dari debitor maupun Pengurus yang ingin menyelesaikan PKPU. Pengurus PKPU pada Kasus PT. PSA dinilai dapat menerapkan prinsip itikad baik sesuai dengan kriteria penilaian itikad tidak baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

**Kata Kunci:** Itikad Baik, Pengurus, PKPU

## ABSTRACT

Name : Ruth Sarah Magdalena

NIM : 01659210071

Title : **“Implementation of good faith from the Administrator of Suspension of Debt Payment Obligations PT Prakarsa Semesta Alam”**

(xi + 107 pages)

*In the context of Suspending Debt Payment Obligations (SDPO), the appointment of administrators is pivotal for executing their responsibilities and authority in a manner guided by good faith. This study aims to address, comprehend, and resolve issues pertaining to the regulatory framework governing the roles and functions of administrators in SDPO within Indonesia. Additionally, it seeks to explore the practical implementation of good faith by SDPO administrators, focusing on the case of PT Prakarsa Semesta Alam (PT PSA). The research methodology adopts a normative juridical approach. The findings of the research highlight that guidelines regarding the good faith conduct of SDPO administrators are delineated in the relevant statutory provisions and their corresponding enforcement regulations, as well as in the Professional Standards for Administrators in Indonesia. Examining various cases discussed in this research reveals instances where parties demonstrated good faith. Notably, among the three examined decisions, Decision Number 175/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. stands out as an illustration of the Debtor's good faith. The research underscores that factors such as the business sector and the actual value of the outstanding debt may influence the debtor's intentions in adhering to the principles of good faith when seeking to fulfill SDPO requirements. Within PT PSA, the management of SDPO is deemed capable of adhering to the principle of good faith, aligning with the criteria set forth in assessing bad faith in the execution of their duties and authority.*

**Keywords:** *Good faith, Suspension of Debt Payment Obligation, Administrator*